

## Peran Negara terhadap Konflik SARA di Indonesia : Kajian Historis

Suyahmo  
Praktisi demokrasi  
Suyahmo55@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah terhadap konflik berbasis SARA di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan kajian konsep historis. Sumber data sejarah primer dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dan artikel. Hasil penelitian ini mengungkap perbandingan peran pemerintah sejak masa transisi yaitu masa setelah berganti kepemimpinan orde baru hingga era demokratis. Masa transisi yang gelap, bergeser menjadi dinamis, karena faktor tingkat kesadaran berdemokrasi yang semakin meningkat. Kesimpulan penelitian ini adalah potensi konflik horizontal di Indonesia sebagai negara plural sangat riskan terjadi, dan bisa menjadi bom waktu yang dahsyat. Sentiment identitas semakin tajam dikarenakan terdapat kepentingan elit politik yang mendorong adanya *patronase civil society* dan media.

**Kata kunci:** negara; peran; era orde baru; era demokratis

**Abstract.** This study aims to analyze the government's role in the SARA conflict in Indonesia. This research method used historical concept studies. Primary historical data sources and secondary data sourced from books and articles. The results of this study reveal a comparison of the government's role since the transition period, namely the period after changing the leadership of the new era to the democratic era. The dark transition period have shifted to become dynamic, due to the increasing level of democratic awareness. The conclusion of this study is the potential for horizontal conflict in Indonesia as a plural country as high risk, and become a powerful time bomb. The sentiment of identities are getting sharper because there are political elites interests that encourage the patronage of civil society and the media.

**Keywords:** state; role; new era; democracy era

### Pendahuluan

Di era setelah bergantinya kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami dilema demokrasi yang sangat pelik. Berbagai peristiwa atau kejadian hasil dari proses transisi mempengaruhi setiap sendi-sendi kehidupan. Pada saat itu terjadi relasi kuat antara kekuatan kekuasaan dan militer. Negara secara berlebihan menegakkan stabilitas keamanan, politik, ekonomi, dan sosial, sehingga menimbulkan berbagai tingkat kerawanan sosial.

Krisis ekonomi pada masa 1997/1998 menjadikan era orde baru yang sebelumnya sangat kuat berubah menjadi masa yang sangat rentan baik sosial dan politik. Kerentanan politik menimbulkan keretakan dan perpecahan kekuasaan yang menimbulkan kerawanan sosial di tingkat daerah dan merembet ke skala nasional.

Transfer kekuasaan kemudian berpindah ke kepemimpinan B.J. Habibie yang berasal dari sipil. Dilema demokrasi pada masa transisi di era B.J. Habibie merupakan hasil dari proses sebelumnya pada era Soeharto yang tidak membangun

sebuah sistem politik yang demokratis namun membangun sistem politik yang stabil seperti halnya sistem politik yang dibangun pada masa Soekarno. Menurut Karl D. Jackson (1978) menyebut bahwa pemerintahan Soeharto merupakan kelanjutan dari pemerintahan Soekarno, yaitu pergantian pemerintahan Soekarno ke Soeharto lebih pada pergantian dari corak otoriter yang satu ke corak otoriter yang lain.

Warisan kepemimpinan dari sistem otoriter menuju demokrasi menjadi tugas yang sangat berat pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Masa transisi adalah interval (selang waktu) antara satu era politik kekuasaan satu dengan era yang lain, (O'Donnel dan Schmitter, 1993). Huntington (1995) menjelaskan masa transisi adalah masa dimana berakhirnya rezim otoriter, dibangunnya rezim demokratis, dan konsolidasi rezim demokratis. Transisi demokrasi yang berjalan tidak sempurna menjadi pola demokrasi yang rentan, (Stephan dan Juan Luiz, 1966).

Kerentanan demokrasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dipengaruhi oleh beberapa faktor. Disamping bukan berasal dari kalangan militer, adanya dorongan yang sangat kuat dari kelompok oposisi untuk segera mempercepat proses demokrasi dari hulu ke hilir menjadi momentum lahirnya beberapa kerawanan sosial yang terjadi pada level bawah.

Tingkat kerawanan sosial menghilangkan pluralitas dan kohesivitas sebagai Bangsa Indonesia dengan munculnya berbagai konflik horizontal yang dibangun berdasarkan identitas, baik bersumber dari etnisitas, agama dan kelompok-kelompok masyarakat yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Menanggapi berbagai tuntutan baik dari oposisi dan sekaligus dari kelompok masyarakat *civil society* untuk segera bergerak untuk menghilangkan sistem otoriter dengan menghilangkan fungsi TNI/ABRI sebagai fungsi stabilitas, menuju sistem demokrasi menjadi cambuk panas pada masa pemerintahan setelah era orde baru. Peran pemerintah pada masa itu semakin berat, disatu sisi harus menyelesaikan persoalan internal elite kekuasaan yang terpecah sekaligus membina elit-elit lokal dan sistem pemerintahan daerah menuju tata kelola yang demokratis. Tingkat kesulitan yang tinggi menjadi PR bagi pemerintah pusat untuk mewujudkan demokrasi dari hulu ke hilir menimbulkan kerancuan demokrasi, diantaranya yaitu; ketidakpastian kebijakan atas batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, munculnya tokoh-tokoh politik baru ataupun lama yang mengemuka dan menimbulkan *side effect* mengganggu proses demokrasi, potensi tingkat kerawanan sosial tinggi dikarenakan semua aspek menginginkan percepatan proses demokrasi (Choup dalam Marijan, 2010).

Guna mempercepat demokrasi dari hulu ke hilir pemerintah pusat membuat kebijakan dengan memberikan hak otonomi yang lebih besar kepada daerah atau desentralisasi (Burn dkk, 1994; Crook dan Manor, 1998; Fesler, 1965; Johnson,

2001; Kurian, 1999; Manor, 1998; Olowu, 2003, dan Smith, 1985), sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Otonomi yang diberikan bukan hanya sebatas pada masalah-masalah politik, masalah administrasi akan tetapi juga masalah-masalah ekonomi. Adanya UU tersebut diharapkan sistem demokrasi desentralisasi menjadi salah satu upaya penguatan pemerintahan daerah sehingga bisa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di daerah baik yang menyangkut sosial, politik, maupun ekonomi.

Namun, politik desentralisasi justru dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik tertentu dalam mempengaruhi masyarakat lokal dengan pandangan sempit mengenai makna tentang kedaerahan dengan membawa identitas dari masing-masing daerah, baik identitas etnis, suku dan agama. Ambisi untuk meraih kekuasaan di daerah seringkali dibayar sangat mahal dengan mengorbankan harta benda, bahkan nyawa akibat dari konflik horizontal yang ditimbulkan karena kepentingan elit politik tertentu. Kekerasan antar kelompok mengemuka sejak masa transisi di daerah Ambon, Maluku Utara (Duncan, 2009), Papua (Timmer J, 2007), Poso Sulawesi Tengah (Lorrain, 2007) yang berbasis agama, serta di Sambas Kalimantan Barat (Taufiq T, 2007), dan Kalimantan Tengah (Braithwhite et al, 2010), berbasis suku, di Pilkada DKI Jakarta yang berbasis etnis dan agama.

Peran negara sempat dipertanyakan pada masa itu, dan diduga negara telah gagal dalam menegakkan aturan dan kontrol terhadap masyarakat. Beberapa hipotesa juga mengarah pada ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia (Timor Timur lepas dari Negara Indonesia pada masa transisi), atau ingin pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru (Maluku Utara, Kalimantan Tengah). Aktor politik elit lokal menjadi pendorong ikut terlibat dalam kerusuhan sosial di beberapa tempat di luar pulau Jawa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran negara dalam mengupayakan ke-integrasian dengan berbagai rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik horizontal yang mengatasnamakan identitas baik identitas etnis, suku dan agama di Indonesia yang dijadikan kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan dari elit politik lokal secara instan.

## **Metode**

Metode penulisan yang digunakan penelitian ini adalah kajian analisis konsep historis. Kajian analisis konsep historis adalah merupakan bagian dari pendekatan kualitatif yang dominan dan mengutamakan pada kajian literature sejarah sebagai sumber data, baik dari data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai sumber sejarah baik dari beberapa buku-buku lama dan atau sanduran buku-buku baru yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian dua puluh tahun silam sejak mulai tahun 1998 tentang konflik komunal di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Data pendukung

yang digunakan adalah data yang berasal dari artikel atau jurnal yang diambil baik dari jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Analisis data kualitatif menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, verifikasi data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber baik dari buku-buku, artikel nasional dan internasional, kemudian tahap verifikasi adalah mengkodifikasi data yang relevan, dan menyimpulkan lanjutnya menulis data positif yang menjadi kajian penelitian, (Creswell, 2010).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran Negara di Era Transisi**

Berakhirnya system otoritarianisme dan berganti masa transisi dimana peran militer tidak lagi dominan untuk menjaga stabilitas di negara ini menyebabkan negara dikatakan dalam keadaan rancu, atau rawan. Hal tersebut dikarenakan kekuatan negara tidak lagi dominan atau negara menjadi lemah (*weak state*). Karena negara lemah maka fungsi kontrol dan kepatuhan menjadi rimpang sehingga menimbulkan banyak kekacauan (*anarchy*) seperti di beberapa tempat di luar Pulau Jawa. Menurut Midgal (1988) jika Negara lemah maka menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan, tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Negara. Kebijakan pemerintah tidak lagi menjadi norma yang mengikat dikarenakan fungsi kontrol stabilitas tidak ada.

Pengalaman sentralisasi yang sangat kuat dari pemerintah pusat di masa orde baru menciptakan kesegregasian yang sangat timpang diantara elite politik lama, elite politik yang baru, dan organisasi masyarakat yang mau mempersiapkan diri menuju masa demokrasi, dimana kebebasan berekspresi menjadi substansi pokoknya menjadi dilemma dikarenakan tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Ketidaksiapan komponen-komponen bangsa-bangsa di sebagian negara dunia ketiga dalam mempersiapkan diri menuju demokratisasi menjadi boomerang dikarenakan tidak didasari dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Maka yang kemudian terjadi adalah proses demokratisasi menjadi pasar bebas bagi elite politik lokal untuk bertindak secara instan sehingga memakan korban yang luarbiasa.

Gelombang demokrasi yang sebelumnya diikat sangat erat, ibarat kuda delman dengan tali kekang yang sangat kuat dengan cambuk cemetar yang digunakan oleh saisnya yang *sangar* dengan menggunakan kekuatan otoritarian untuk mengontrol berjalannya system, tergantung dari pemimpin kemana arah dan tujuan, di era transisi bergeser menjadi tak tentu arah dikarenakan saisnya telah berpindah (*replacement*) kepada sais yang lain, dimana sais masa transisi kurang begitu memiliki modal politik, modal sosial yang baik sehingga delman berjalan rimpang dan selebor dikarenakan komponen penggerak (kuda) dan lingkungan mengalami turbulensi akibat dari perubahan kepemimpinan.

Budaya baru demokrasi pada masa kepemimpinan transisi menciptakan lingkungan tidak stabil, dimana sebelumnya lingkungan tersebut hanya *sendiko dawuh* dan harus taat apa yang diperintahkan oleh pimpinan, berubah menjadi beringas dan liar. Keberingasan kebebasan menjadi sulit di kontrol dan seolah meremehkan pemimpin yang baru, dengan menganggap bahwa pemimpin yang baru tidaklah seperti sebelumnya, yang menggunakan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas negara.

Gambaran bagaimana terkoyaknya negeri ini pada masa transisi menjadi kelemahan baik dalam skala nasional maupun internasional. Kelemahan-kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh aktor politik yang baik yang memiliki kepentingan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan atau para elite lokal baru untuk mendulang kekuasaan. Hal tersebut memicu lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI, dan peristiwa RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku Utara yang muncul kembali dan ingin membentuk negara baru seperti yang telah menjadi tujuan sebelumnya, dimana pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dibumihanguskan oleh masa pemerintahan otoriter.

Keentingan politik internasional di Timor Timur menjadi anggapan bahwa peran pemerintah Indonesia tidak tegas dalam menyingkapi persoalan yang menyebabkan lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI. Keinginan Presiden B.J. Habibie untuk menerapkan demokratisasi dari setiap lini berbuah pada ketidaksepahaman dalam memahami demokrasi yang sesungguhnya. Proses referendum menjadi jalan akhir bagi Timor Timur meskipun dibalik itu bersembunyi kepentingan politik internasional yang mendorong proses percepatan agar Timor Timursegera lepas dari NKRI. Peran antar lembaga negara dalam proses referendum Timor Timur tidak dengan kesepakatan bersama. Lepasnya Timor Timur menjadi hal yang mengecewakan bagi TNI/Polri yang sebelumnya begitu gigih berjuang mempertahankan integrasi Timor Timur (Soeharto B. W, 2013). Kekecewaan TNI/Polri terhadap kepemimpinan masa transisi menjadi sumber kekacauan di wilayah Timor Timur. Pertikaian terjadi antara kelompok anti integrasi yang didukung oleh kekuatan internasional dan pro integrasi yang dibelakangnya adalah kelompok yang kecewa dengan hasil referendum (TNI/Polri).

Tekanan internasional menjadi pemicu munculnya pemberlakuan darurat militer, berlanjut pembentukan pasukan multinasional menggantikan peran TNI/Polri yang dianggap tidak mampu menjaga stabilitas dan terlibat dalam pelanggaran HAM. Ancaman disintegrasi yang mengancam ke-Bhinnekaan bangsa Indonesia berlanjut pada kasus etnis dan agama di beberapa wilayah di Indonesia akibat lemahnya peran negara dan lembaga Negara lainnya.

Peran negara dimasa transisi terhadap penanganan konflik yang bersumber identitas etnis dan agama sangat lemah. Negara justru seolah menjadi permainan politik dari kelompok yang mengatasnamakan kelompok elit lokal dalam upaya

mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Negara. Ketidak seimbangan peran negara dalam ikut terlibat membantu menyelesaikan konflik identitas seringkali terbentur oleh keberpihakan atau condong kearah identitas tertentu (Duncan, 2009; Lorrain, 2007; Taufiq T, 2007; Braithwhite dkk., 2010). Hal tersebut menimbulkan konflik justru semakin rancu dan semakin melebar. Dan ketika negara dianggap tidak mampu justru semakin memperkeruh kondisi konflik menjadi sumber kepentingan bagi elit politik untuk menyerang negara. Pada kasus Timor Timur, kebijakan yang dilakukan oleh Presiden B.J.Habibie dianggap tidak berpihak kepada NKRI dengan alasan disatu sisi pemerintah dipersulit oleh tekanan dunia internasional di sisi lain pemerintah dianggap menjual negara sendiri (Soeharto B. W, 2013).

Lemahnya peran negara di era reformasi juga terjadi dalam penanganan konflik politik yang menggunakan dalih ideology agama dan identitas (pribumi dan pendatang) di Maluku Utara, dan Ambon kemudian Poso Sulawesi Tengah. Rozi dkk (2006) menyebut pada pemerintahan B.J.Habibie kurang berkonsentrasi atas masalah konflik yang terjadi dikarenakan disibukkan oleh masalah Timor Timur yang menguras banyak tenaga dari lembaga negara. Konflik pun meluas tidak hanya dalam satu titik saja, namun melebar ke beberapa tempat ke daerah lainnya. Lemahnya negara dalam penanganan konflik dipengaruhi oleh peran aparat keamanan yang berfungsi sebagai aplikator.

Kelambanan peran negara dalam upaya menyelesaikan konflik komunal di Sulawesi juga dipengaruhi oleh peran oknum aparat yang ikut terlibat dalam kekacauan. Kehadiran aparat keamanan justru menambah eskalasi konflik dengan berpihak pada kelompok tertentu (Rozi dkk., 2006; Yanuarti S, 2003). Bukan hanya oknum militer yang ikut terlibat, namun juga oknum kepolisian. Inisiatif penyelesaian konflik justru datang dari berbagai tokoh masyarakat setempat.

Penelitian Duncan (2009), kekecewaan masyarakat Maluku Utara terhadap pemerintah dan aparat keamanan untuk mengurangi konflik menjadi inisiatif untuk melakukan renungan dengan menggunakan adat *Tobelo* sebagai upaya penyatuan kembali antar kelompok-kelompok yang bertikai yaitu kelompok Muslim dan Kristen untuk bersatu mencegah konflik agar tidak terulang. Sedangkan Rozi dkk. (2006), menjelaskan bahwa ikatan emosional dalam bentuk hubungan pertalian darah atau keluarga meskipun berseberangan dalam keyakinan sangat berperan dalam penyelesaian konflik komunal yang terjadi. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat mengenai konflik yang hanya menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, memunculkan perasaan lelah berkonflik menjadi dorongan percepatan penyelesaian konflik.

Peran aparat keamanan sebagai representasi dari pemerintah pusat pada kasus konflik antar etnis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki kesamaan dalam keterlibatan berpihak pada salah satu etnis tertentu. Penelitian

Braithwaite dkk. (2010), mengungkap bahwa peran aparat keamanan terhadap konflik etnis di Kalimantan Barat ikut terlibat dalam konflik antar etnis, dengan upaya mendukung salah satu etnis tertentu terlihat dalam kasus pembiaran masyarakat Suku Dayak dalam pengusiran etnis Madura untuk keluar dari wilayah Sambas Kalimantan Barat, sementara etnis Jawa tetap bertahan. Begitu juga dalam penelitian Soeharto (2013), menyebut bahwa dukungan aparat keamanan pada salah satu etnis tertentu yaitu etnis Madura menimbulkan kekecewaan terhadap tindakan aparat yang berkesan diskriminatif (pada kasus aksi penyerangan etnis Madura ke perkampungan etnis Dayak dan mengakibatkan tiga orang tewas, tetapi yang ditangkap cuman satu orang etnis dari Madura. Peristiwa tersebut diawali dengan kejadian pencurian yang sebelumnya dilakukan oleh salah satu warga etnis Madura di perkampungan etnis Dayak dan berujung pada tewasnya akibat di keroyok massa).

Kelambanan aparat keamanan disertai dengan ketidakseimbangan dalam memberikan pelayanan hukum pada masing-masing etnis di Kalimantan Barat merembet pada kejadian konflik etnis di Sampit Kalimantan Tengah. Masing-masing etnis memiliki persepsi yang sama tentang hal tersebut, sehingga ketidakpastian hukum bagi masyarakat tidak berjalan dan justru menimbulkan konflik yang memakan banyak korban. Menurut Braithwaite dkk. (2010), aparat keamanan justru melakukan tindakan pragmatis, dengan mendukung salah satu etnis untuk menyelesaikan persoalan tindak pidana criminal, pada kasus penangkapan beberapa masyarakat etnis Dayak yang ditangkap dan dianggap provokator pada kerusuhan Sampit.

Ketidakpuasan dan ketidakadilan hukum pada konflik Sampit Kalimantan Tengah pada aparat pemerintah dan lembaga keamanan negara dibuktikan dalam kesepakatan bersama masyarakat etnis Dayak yang dilakukan pada tanggal 21 Februari tahun 2001, yang berisi tentang mengharap agar aparat keamanan bertindak seadil-adilnya tanpa memihak salah satu etnis tertentu, dimana hukum harus ditegakkan secara seimbang dan tidak berpihak, dan elit politik dari Kalimantan Tengah harus bertanggungjawab dan segera menyelesaikan konflik secara adil dan berimbang agar warga kembali hidup dengan rasa aman, dan damai.

Kelemahan negara di era transisi dimanfaatkan oleh oknum politisi baik elit pusat maupun lokal yang bersifat *rente*, artinya masing-masing memiliki tujuan bersama untuk menggapai kepentingannya, dikarenakan masa transisi adalah masa yang tepat untuk menggoyang negara dan atau ingin membuat sebuah negara baru dan atau ingin pemekaran wilayah baru. Menurut Rozi dkk. (2006) bahwa konflik komunal yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada masa transisi memang sudah di design dan di rencanakan dengan matang, seperti halnya dugaan dari masyarakat Suku Dayak dalam menyingkapi konflik antar etnis di Sampit Kalimantan Tengah.

### **Peran Negara di Era Lebih Demokratis**

Penanganan konflik politik yang bersumber pada identitas di masa yang lebih demokratis seperti sekarang ini dimana kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen stabilitas yang dominan setelah perubahan pada era masa transisi pada 1999. ada pembagian tugas dan fungsi TNI dan Polri, civil society semakin kuat, dibantu dengan media yang merupakan sarana yang efektif untuk *mob*, menciptakan penanganan yang berbeda dalam menyelesaikan konflik identitas. Bagaimana peran media dalam mempengaruhi setiap kebijakan negara diungkapkan oleh Marijan (2010) bahwa media massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berpolitik. Demokratis atau tidaknya sebuah Negara sangat berkaitan dengan seberapa jauh memberikan ruang bagi media massa sebagai lahan berekspresi dan berpendapat. Media dan *civil society*, adalah bagian dari demokrasi, bagaimana membangun demokrasi yang baik tergantung dari dua komponen, yaitu kebebasan ruang media sebagai lahan berekspresi dan berpendapat dan penguatan *civil society* yang berfungsi sebagai alat kontrol Negara dan kebijakannya. Mendukung pernyataan Marijan, negara dikatakan sebagai Negara demokrasi jika memiliki asas (1) Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai penghargaan martabat manusia, (2) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan (Suyahmo :2015).

Bangunan sistem demokrasi inilah yang tidak berfungsi selama era orde baru, dimana semua dikendalikan dalam sistem sentralisasi, dengan menggunakan tindakan represif dan otoriter dengan menggunakan alat militer, dan seolah hukum ditentukan elite yang berkuasa dan yang memiliki modal ekonomi yang kuat, sehingga yang kemudian terjadi adalah kesenjangan, dan ketidakseimbangan sistem. Kritik dari Marijan (2010) menyatakan bahwa yang menjadi persoalan bagi demokrasi di era sekarang adalah jika kedua elemen penting demokrasi, media dan *civil society* menggunakan sistem *rente* atau *patronase*, dimana komponen tersebut menjadi satu kesatuan dengan kelompok penguasa dengan tujuan untuk menopang dan melanggengkan kekuasaannya, dikarenakan kepentingan politik dan ekonomi, maka demokrasi akan berjalan rimpang. Kerimpangan demokrasi akan menciptakan kembali pada era baik orde lama dan orde baru, dimana kebijakan Negara lemah dikarenakan ketidakcakapan pemimpin yang tidak memiliki modal sosial yang baik, modal politik yang kuat, serta tidak adanya kepastian dan keseimbangan hukum.

Menurut Marijan (2014) peran negara di era demokrasi sekarang ini untuk menciptakan iklim yang demokratis, maka hendaknya negara harus memiliki modal sosial yang baik, modal politik yang kuat, modal ekonomi yang cukup, dan juga didukung oleh media yang seimbang, serta komponen *civil society* yang betul-betul bisa berjalan dengan fungsinya, yaitu mengontrol setiap kebijakan negara dan penegakan hukum, agar berjalan dengan seimbang. Terlebih dalam memanfaatkan

celah atau saluran yang berkaitan dengan setiap urusan yang berhubungan dengan ketimpangan Undang-undang. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan demokrasi yang sebenarnya.

Sedikit mengulas beberapa kejadian konflik politik pada tahun 2017 lalu, di DKI Jakarta, dimana terdapat kepentingan politik yang tujuan utama adalah mencoba membuat kekacauan dalam ruang di Pilkada DKI, dengan sumber identitas etnis dan agama menjadi sarana untuk mencoba membangun situasi kisruh politik negara. Kepentingan politik yang dibangun oleh kelompok *civil society* intoleran berpatronase dengan komponen-komponen elit politik oposisi yang di design untuk membuat kekacauan negara, agar tujuan kepentingan dapat tercapai yaitu melemahkan kekuasaan Presiden. Kejadian tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi Negara pada masa transisi, dimana negara lemah dikarenakan antar lembaga dan komponen negara tidak bersinergi satu sama lain.

Bersumber dari kasus tersebut bisa dikatakan bahwa negara akan kuat jika dalam internal kekuasaan memiliki pemimpin yang kuat, seimbang, menyerahkan kepada penegakan hukum yang seadil-adilnya, sehingga adanya kepastian hukum, disamping itu baik modal sosial maupun modal politik serta menjaga sinergisitas dengan aparat keamanan yang baik, maka sistem demokrasi akan berjalan dengan baik dan seimbang. Jadi, peran negara di era yang lebih demokratis mengacu kepada tatanan yang seimbang, seimbang dengan komponen negara lainnya, alat negara, media dan *civil society*. Seorang pemimpin dalam system presidensial harus memiliki kelengkapan untuk memperkuat demokrasi yang sudah hampir terbangun dengan baik, diantaranya adalah memiliki modal sosial yang sangat baik, memiliki modal politik yang mumpuni, dan modal capital yang mencukupi (Marijan, 2006).

## **Simpulan**

Dampak konflik SARA yang mengancam disintegrasi bangsa bergantung pada stabilitas keamanan, dan stabilitas politik yang dibangun oleh masing-masing komponen negara. Peran kuat negara dan sistem pemerintahannya menjadi faktor utama dalam menentukan keamanan, kenyamanan semua komponen yang ada didalamnya. Perpindahan era orde baru ke era demokratis adalah proses dinamika yang panjang dan berdampak sistemik. Meskipun dampak konflik yang terjadi cukup melelahkan, namun pengalaman politik jauh lebih berharga. Sistem presidensial harus dibangun dengan sangat kuat, sehingga berbagai persoalan termasuk konflik dapat teratasi dengan baik.

## **Daftar Pustaka**

Alfred Stephan and Juan Luiz. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore: John Hopkins University.

- Angel Rabasa and John Haseman. (2002). *Communal Conflict In Eastern And Central Indonesia. The Military and Democracy in Indonesia*. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1599srf.18>
- Braithwaite J, Valerie B, Michael C. and Leah D. (2010). West Kalimantan and Central Kalimantan. Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hf62.11>
- Burns, Danny, Robin, Hambleton, and Paul Hoggett (1965). *The Political of Decentralization: Revitalizing Local democracy*. McMillan London.
- Christopher R. D. (2009). Reconciliation and Revitalization: The Resurgence of Tradition in Postconflict Tobelo, North Maluku, Eastern Indonesia. *The Journal of Asian Studies* Vol. 68, No. 4 (November) 2009: 1077–1104. doi:10.1017/S002191180999074X
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, 2<sup>nd</sup> ed.* Thousand Oaks, CA. Sage Publication
- Crook, R C and James Manor. (1998). *Democracy and Decentralization in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Fesler J W. (1968). Approaches to the Understanding of Decentralization. *The Journal of Politics*, 27 (3): 536-566
- Guillermo O'Donnel and Philippe C. Schmitter. (1993). *Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta. LP3ES.
- Huntington S. (1991). *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press. Norman.
- Huntington S. (1995). *Gelombang Demokratisasi ketiga*. Jakarta, Grafiti.
- Timmer, J. (2007). Erring decentralization and elite politics in Papua. Renegotiating Boundaries. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76x39.25>
- Jacson, Karl D. (1978). *Bureaucratic Policy: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia*, dalam Kard D. Jackson dan Lucian W. Pye (eds) *Political Power and Communication in Indonesia*, University of California Press, Berkeley.
- Johnson, C. (2001). Local Democracy, Democratic Decentralization and Rural Development: Theories, Challenge, and Option for Policy. *Development Policy Review*, 19 (4): 521-532
- Kurian, G. (1999). *Empowering Condition in the Decentralization Process: an Analysis of Dynamics, Factors, and Actors in Panchayati Raj Institution from West Bengal and Karnataka, India*. Institute of Social Studies, The Hague.
- Lorraine V. Aragon. (2007). Elite competition in Central Sulawesi. Renegotiating Boundaries. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76x39.8>
- Manor, J. (1999). *The Political Economy of Democratic Decentralization*. The World Bank Washington DC.
- Marijan, K. (2010). *System Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Demokrasi*. Jakarta. Prenadamedia group.
- Marijan, K. (2006). *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Eureka. Surabaya.
- Midgal, J. S. (1988). *Strong Societies and Weak Societies*. New Jersey: Princeton University Press.
- Olowu, D. (2003). Local Institutional and Political Structures and Processes: Recent Experience in Africa. *Public Administration and Development*, 23 (1): 41-52.

- Rozi S, Dhurorudhin M, Emilia Y, Nurhasim, Tri R, Heru C, dan Septi S. (2006). *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Smith B. C. (1985). *Decentralization: the Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin. London.
- Soeharto, W. B. (2013). *Menangani Konflik di Indonesia*. Jakarta. Kata Hasta Pustaka
- Suyahmo. (2014). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Magnum Pustaka Utama. Yogyakarta
- Taufiq Tanasaldy. (2007). Ethnic identity politics in West Kalimantan. Renegotiating Boundaries. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76x39.20>
- Wasino. (2006). *Wong Jowo dan Wong Cina: Lika-Liku Hubungan Sosial antara Etnis Tionghua dengan Jawa di Solo Tahun 1911-1998*. Semarang Unnes Press.
- Yanuarti S. (2003). *Konflik di Maluku Tengah*. Jakarta. IPSK LIPI.